

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Melayu Patani adalah suatu kelompok masyarakat yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Kata Patani merupakan wilayah atau "*Changwad Pattani*" sebagaimana yang wujud dalam peta negara Thailand sekarang. Tetapi Patani merujuk kepada sebuah negeri yang sangat luas yaitu meliputi wilayah Narathiwat, Yala dan sebagian dari Songkhla (daerah-daerah Sebayor dan Tibor). Adapun masyarakatnya berdarah Melayu Patani dan tinggal di Thailand Selatan.

Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan Semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah yang diantaranya adalah wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu yang beragama Islam di bawah perintah agama Buddha.

Masyarakat Melayu di tiga provinsi Thailand Selatan (dikenali juga sebagai masyarakat Melayu Patani) merupakan salah satu kelompok minoritas di Thailand, namun sebaliknya mereka merupakan kelompok mayoritas di tiga provinsi Thailand

Selatan. Masyarakat Melayu Patani merupakan orang Melayu dari segi kebudayaan, adat istiadat dan juga rupa paras [CITATION Ahm94 \l 1033].

Sejak tahun 1785 M, kerajaan Patani terkenal dengan bumi jajahan Thailand, dan diresmikan pada tahun 1902 M, sebagai bagian dari negara Thailand. Selama 117 tahun (1785-1902) Thailand menggunakan berbagai politik atau cara untuk melemahkan kerajaan Patani. Menurut Organisasi *Human Rights Watch* (HRW), sepanjang kurun waktu tersebut banyak warga Muslim yang diculik, disiksa dan dibunuh tanpa alasan. Selama berpuluh-puluh decade rakyat Melayu Patani berada didalam tekanan/tindasan Thailand, dan tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan budaya, mengamalkan agama dan sebagainya.

Tekanan dan penindasan tersebut mendorong rakyat Melayu Patani berusaha keras untuk melepaskan diri dari jajahan Thailand yang selama ini merenggut kemerdekaan mereka. Tujuan utama rakyat Melayu Patani adalah untuk mempertahankan wilayah atau daerah mereka yang telah dikuasai oleh kerajaan Thailand selama berabad-abad lamanya, sekaligus untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai budaya yang selama ini mereka anut. Rakyat Melayu Patani menjadikan perjuangan mereka sebagai jihad karena jihad merupakan kewajiban bagi umat Islam apalagi terhadap kepentingan agama.

Sejak 1906, sesuai dengan perjanjian Inggris-Siam, Thailand secara resmi mengambil alih negara-negara di Melayu Utara: Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla, dan Satun, yang kemudian menjadi provinsi di Thailand. Sementara Negara di

Melayu Utara yang lain: Kedah, Kelantan, Perlis dan Terangganu oleh Inggris dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia [CITATION Ahm94 \l 1033].

Sejak penyatuan Negara di wilayah Melayu Utara ke dalam bagian Thailand, terjadi benturan budaya antara Muslim Melayu dan Thai Buddhis. Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasai oleh Perdana Menteri masa tersebut yaitu Jenderal P. Pibhulsongkram (1938-1944), Marshal Sarit Thanarat, (1958-1963) dan para Jendral lainnya, kebijakan nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan utama. Upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai secara kuat di seluruh Thailand, termasuk wilayah Selatan, membuat benturan budaya yang keras dan menimbulkan resistensi sangat kuat bagi rakyat Melayu Patani di Thailand Selatan.

Upaya modernisasi dan pembaharuan administratif untuk menyatukan negara yang telah dimulai di bawah kerajaan yang terdahulu kehilangan momentumnya. Negara kembali terancam disintegrasi sebagai akibat adanya konflik-konflik kekuasaan di pusat dan persaingan etnis di daerah-daerah. Dan pada waktu itu juga pemerintah mengupayakan asimilasi kebudayaan sehingga kebudayaan Melayu Patani menjadi berkurang. Maka etnis Melayu mempertahankan identitas mereka dengan berbagai cara sehingga ada perlawanan etnis Melayu dengan pemerintah Thailand dalam mempertahankan identitas mereka [CITATION Pra04 \l 1033]. Akhirnya muncul gerakan separatisme yang semakin berkembang, sehingga munculnya kekerasan yang sulit diatasi. Terdapat tiga peristiwa atau insiden yang mengesankan pada tahun 2004 sangat menarik perhatian masyarakat Thailand dan dunia internasional

Pertama, pada tanggal 4 Januari 2004 terjadi insiden yang di anggap sebagai insiden awal atau akar terjadinya kekerasan di Thailand Selatan (*Api Selatan*) yaitu insiden “*Plon Peun*” (ปล้นปืน) atau Pencurian Senjata. Insiden *Plon Peun* terjadinya di provinsi Narathiwat. Pada kejadian tersebut terdapat empat tentara yang menjadi korban. Departemen Investigasi Khusus (DSI) menyatakan bahwa penjahat telah mencuri senjata senapan 413 silinder yang merupakan senjata milik pemerintah. Sejak insiden tersebut hingga sekarang, para pejabat pemerintah hanya menemukan 94 silinder senapan. Senjata-senjata yang telah dicuri oleh kelompok separatisme tersebut digunakan untuk melakukan kekerasan di daerah provinsi Thailand Selatan. Hal ini menimbulkan perasaan dilema oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat Melayu Patani. [CITATION Tha16 \l 1033].

Kedua, pada tanggal 28 April pada tahun yang sama yaitu 2004 terjadinya insiden “*Krue Sek*” (กรือเซะ) yang merupakan masjid tertua di Pattani. Kekerasan di *Krue Sek* telah menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terhadap masyarakat Melayu Patani tanpa rasa kepedulian terhadap masyarakatnya sendiri. Maka menimbulkan perasaan diskriminasi oleh masyarakat terhadap pemerintah [CITATION Isr11 \l 1033].

Ketiga, kekerasan tetap berlanjut pada tanggal 25 Oktober 2004 merupakan tanggal bersejarah yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat Melayu Patani. Peristiwa ini disebut oleh media sebagai insiden “*Tak Bai*” (ตากใบ). Peristiwa ini terjadi di depan kantor polisi Distrik Tak Bai, provinsi Narathiwat yang bertepatan dengan bulan Ramadhan 1425 H. Saat itu sejumlah orang Muslim mendatangi untuk

demonstrasi kepada polisi untuk membebaskan enam orang sukarelawan pertahanan kampung yang ditahan tanpa bukti kesalahan oleh pemerintahan pusat.

Aksi protes warga di Tak Bai yang tanpa senjata itu, berubah menjadi medan perang yang tidak terkendali dalam sekejap mata. Polisi dan tentara pemerintah melepaskan tembakan gas air mata dan tembakan peluru ke arah masyarakat yang sedang beraksi damai. Kemudian menangkap warga dengan cara membaringkan mereka berlapis-lapis sekitar 4-5 lapis dalam satu truk untuk mengantarkan ke kantor polisi [CITATION Is16 \l 1033]. Peristiwa tersebut menewaskan 85 korban ketika mengantarkan ke kantor polisi, enam orang meninggal ketika demonstrasi, sejumlah warga terluka dan selamat.

Kondisi yang dirasakan masyarakat Melayu Patani hingga saat ini merasa terancam dan tidak aman dalam aktivitas kesehariannya di Thailand Selatan. Setiap terjadi konflik antara tentara dan masyarakat Melayu Patani sering menjatuhkan korban masyarakat sipil di Thailand Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik yang belum selesai antara masyarakat Melayu Patani dengan pemerintah Thailand.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana solusi penyelesaian konflik Thailand Selatan dapat dilihat dari konsep *Collective Identity* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah latar belakang konflik di Thailand selatan,

2. Untuk mengetahui penanganan pemerintah pusat Thailand dalam menyelesaikan konflik di tiga provinsi Selatan,
3. Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik,
4. Untuk membahas alternatif atau cara-cara yang paling tepat untuk dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini untuk menambah substansi keilmuan terkait bidang Politik khususnya tentang penyelesaian konflik.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi konflik politik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini akan membahas tentang dinamika konflik di Thailand Selatan, dan memberikan solusi alternatif kepada pemerintah dalam mengatasi konflik. Penelitian ini harus dilakukan karena konflik yang telah lama menghancurkan kemakmuran yang seharusnya telah berada di Thailand Selatan, peneliti memberikan alternatif *Collective Identity* kepada pemerintah dalam mengatasi konflik di Thailand Selatan, karena belum ada penelitian lainnya yang membahas tentang alternatif *Collective Identity* ini.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan sejarah awal kejadian konflik, termasuk insiden pokok kejadian konflik. batas waktu adalah pada tahun 2004, dikarenakan tahun tersebut konflik mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia internasional. Peneliti akan mengangkat beberapa cara yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap wilayah Thailand Selatan sejak tahun 2004 sampai 2019. Penelitian ini akan membahas konflik-konflik yang dapat terlihat, dan tidak terlalu memfokus kepada hal-hal yang kompleks. Penelitian ini juga akan membawa kasus yang relevan dengan konsep yang dipilih oleh peneliti yaitu konsep *Collective identity*. Namun, penelitian ini akan membatasi beberapa pendalaman data konflik dikarenakan beberapa data sulit untuk didapatkan dan beberapa data sangat sensitif untuk mengolektifkan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Konflik yang terjadi di Thailand Selatan terdapat beberapa masalah pokok yang berupa masalah identitas, agama dan kesamaan yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga masyarakat minoritas merasa didiskriminasi oleh pemerintah dan kaum mayoritas. Konflik di Thailand Selatan dapat dipandang juga dari pandangan konstruktivisme, dimana konstruktivisme membahas mengenai identitas dan kepentingan yang perlu ditentukan oleh pemerintah. Konsep *Collective Identity* merupakan konsep yang terkait dengan pengelola identitas-identitas yang

berbeda agar menjadi satu yang telah diterapkan oleh ASEAN dan beberapa negara sebagai berikut :

Menurut Wendt (1992), konstruktivisme ini dapat digunakan untuk lebih memahami kondisi politik yang terus berubah. Dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif; dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya, dan yang memahaminya. Dunia sosial dibuat atau dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Sebagai contoh tentang dilema keamanan, bukan hanya dibuat dari fakta bahwa dua negara berdaulat memiliki senjata nuklir, Ia juga tergantung pada bagaimana negara-negara tersebut memandang satu sama lain. Struktur sosial memiliki tiga elemen : pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktek. Pertama, struktur sosial dijelaskan, dalam beberapa hal, oleh pemahaman, harapan atau pengetahuan bersama.

Hal ini menciptakan aktor-aktor dalam suatu situasi dan sifat hubungan mereka, dalam mempertimbangkan kooperatif ataupun konfliktual. Struktur sosial yang terdiri dari pemahaman intersubjektif dimana negara-negara sangat curiga bahwa mereka membuat asumsi-asumsi keadaan yang buruk tentang maksud masing-masing pihak, dan sebagai akibatnya menegaskan kepentingan mereka dalam hal menolong diri sendiri. Komunitas keamanan merupakan suatu struktur sosial yang berbeda yang terdiri dari pengetahuan bersama, dimana negara percaya satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tanpa perang. Ketergantungan struktur sosial pada pemikiran-pemikiran ini adalah hal dimana konstruktivisme memiliki pandangan idealis struktur.[CITATION Wen92 \l 1033]

Adapun tulisan dari Rijal (2016) dalam jurnalnya yang memberikan pengertian tentang pandangan konstruktivisme dari pandangan Indonesia dalam bergabung dengan ASEAN *Political-Security Community* (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar ASEAN *Community*. APSC merupakan upaya kerja sama negara-negara ASEAN dalam mewujudkan keamanan bersama, perdamaian dan lingkungan yang stabil untuk memajukan ASEAN sebagai organisasi regional. Dalam pandangan Indonesia, ancaman terorisme dan implikasinya terhadap ASEAN merupakan salah satu alasan yang mendorong mengapa ASEAN perlu mengembangkan APSC, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dan keamanan antar negara anggota ASEAN. Sekalipun perlu ditegaskan, bahwa APSC bukan hanya memberikan perhatian terhadap terorisme sebagai ancaman bersama, melainkan kerangka APSC mencakup seluruh aspek politik-keamanan yang menjadi tantangan kerja sama regional ASEAN, termasuk masalah demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, konsep komunitas politik-keamanan yang dicanangkan Indonesia juga menengahkan pengembangan suatu lingkungan yang adil, demokratis dan serasi (harmonious) serta penegakan hak-hak dan kewajiban asasi manusia. [CITATION Naj16 \l 1033]

Konstruktivisme dapat dipahami juga bahwa aktor-aktor yang sudah terkonstruksi secara sosial dan bersama dengan hal tersebut, muncul pula bahwa kepercayaan bahwa dalam praktik dan institusi-institusi yang pada awalnya dianggap paling mustahil untuk berubah.

Menurut Rosyidin (2014) dalam penelitiannya *ASEAN (In) Security Community: Arms Race and Collective Identity Building in Southeast Asia* tentang pentingnya menggunakan konsep *Collective Identity* dalam menyatukan komunitas keamanan ASEAN (*ASEAN Security community*), karena *Collective Identity* sebagai dasar solidaritas komunitas, dan loyalitas yang menggerakkan pemikiran dan tujuan yang sama. Namun, tanpa adanya *Collective Identity* negara-negara tidak dapat berkerjasama [**CITATION Muh14 \ 1033**]. Tulisan Rosyidin berbeda dengan penelitian ini bahwa penelitian akan menggunakan konsep *collective identity* sebagai alat analisis konflik.

Dilanjutkan Emanuel (2005) dalam jurnal berjudul, *Communitarian International Relations: The Epistemic Foundations of International Relations*, ia menjelaskan tentang keberhasilan pembentukan komunitas keamanan oleh ASEAN dengan menggunakan *Collective Identity*, bahwa kesadaran yang dimiliki oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina tentang ancaman ideologi komunisme yang merupakan ideologi yang tidak disetujui oleh lima negara tersebut. Untuk menghindari ancaman komunis mereka yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama mendirikan organisasi ASEAN sebagai tanggapan terhadap ancaman komunisme yang diekspor oleh Uni Soviet. Persepsi umum adalah faktor yang memungkinkan negara-negara di kawasan sepakat untuk membentuk organisasi regional yang berfungsi seperti benteng untuk mencegah penyebaran pengaruh ideologi komunis. Demikian, negara

menyadari ancaman komunis di kawasan ini sehingga mereka berusaha mencegah penyebaran ancaman ini dengan mendirikan komunitas keamanan. Keberhasilan dalam pembentukan komunitas keamanan tersebut berkembang terus hingga sekarang. [CITATION Adl16 \l 1033].

Dilanjutkan oleh juga Acharya, dalam bukunya *The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia* dan *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*, ia menjelaskan tentang hasil *Collective Identity* dari ASEAN. ASEAN berhasil dalam membangun *collective identity* pada regionalnya. Meskipun, ASEAN memiliki 10 negara yang berbeda-beda suku bangsa, budaya, bahasa, hukum, politik, dan perekonomian [CITATION Ami00 \l 1033]. (ASEAN saat ini sedang membangun tiga regional masyarakat, yang mencakup urusan politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Terlepas dari beberapa perpecahan dan kendala internal yang dipaksakan oleh kehadiran kekuatan besar dan pengaruh, ASEAN tetap berada di antara kelompok-kelompok regional yang paling kohesif dan dinamis di Asia dan dunia saat ini Norma-norma di seluruh interaksi intraregional membentuk suatu perasaan "we-ness" [CITATION Ami03 \l 1033].

Dibahas juga oleh Panich (2011) dalam jurnal *European Union identity and struggle for empire*, ia menjelaskan tentang hasil *Collective Identity* dari pembentukan Uni Eropa bahwa Uni Eropa sebagai kondisi hasil kesepakatan antar 27 anggota negara yang memiliki tingkat konsistensi yang cukup tinggi dan saling interdependen. Moto dari Uni Eropa sendiri berfokus kepada kesatuan, kombinasi bersama di bawah perbedaan *United in diversity* dan meminimalisir perbedaan

dengan *Systematic De-diversity*. Uni Eropa menggunakan mata uang Euro yang sama, penggunaan mata uang yang sama dapat meningkatkan kekuatan simbolis mereka karena kesamaan penggunaan mata uang sebagai penghancuran perbedaan budaya dari masing-masing negara di kawasan Eropa menurut prinsip “tatap bersama di bawah identitas yang berbeda”. Uni Eropa juga mengadakan perjanjian *Schengen Visa*, yang memudahkan masyarakat dalam keluar ke negara lainnya seperti berjalan disekitar rumah. Menurut Kritikon dapat diperjelaskan bahwa atribut pokok yang membentuk *Collective Identity* di benua Eropa terdiri dari: kombinasi bersama, bersama-sama dibawah perbedaan [CITATION Kri11 \l 1033]. Tulisan-tulisan diatas berbeda dengan penelitian ini bahwa penelitian ini akan menggunakan konsep *collective identity* sebagai alat analisis konflik.

Adapun penelitian terkait penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Pertama dari penelitian Naslan Wadeng Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universtas Islam negeri raden Intan Lampung, yang berjudul “*Konflik sosial pada masyarakat melayu pattani di Thailand Selatan*”, penelitian ini membahas tentang konflik di Thailand Selatan dan menawarkan beberapa cara penyelesaian kepada pemerintah seperti menyerukan pemerintah Thailand untuk memberikan subsidi kepada masyarakat Patani untuk haji, memberikan otonomi kusus kepada masyarakat Patani. Penelitian Naslan Wadeng ini hanya memberikan tawaran hukum yang telah banyak dilakukan oleh penelitian lainnya dan dari beberapa kebijakan yang ditawarkan oleh Nuslan telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, penelitian ini akan

Kedua penelitian dari Ilham Nuereng “*Dinamika bernegara masyarakat asli Thailand Selatan dalam perspektif sosiologi politik Islam*” dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ilham memberikan alternatif penyelesaian yang tidak berbeda jauh dengan Naslan. Ilham menawarkan alternatif penyelesaian eksternal yaitu berkerjasama dengan Malaysia dan Indonesia sebagai mediator penyelesaian konflik. Dari dua penelitian tersebut belum menawarkan pendekatan *Collective Identity* dalam mengatasi konflik, yang merupakan penyelesaian dari akar pikiran masyarakat yang masih merasakan diskriminasi agar lebih merasa bersatu dengan masyarakat Thailand Utara. Maka penelitian ini akan menjadi bahan alternatif kepada pemerintah dalam mencari solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik masyarakat Patani.

1.7 Landasan Konseptual

Konsep *Collective identity*

Konsep *Collective Identity* merupakan konsep yang fleksibel dalam menyatukan perbedaan yang dimiliki oleh negara atau kelompok-kelompok. Pengertian dari kata *Collective* adalah bersama atau gabungan, sedangkan arti dari *Identity* adalah identitas atau ciri-ciri, keadaan khusus seseorang. Identitas dapat dipahami sebagai aspek dari peta kognitif seseorang yang menyangkut konfigurasi dan struktur diri seseorang dalam hubungannya dengan dunia sosial. Peta kognitif adalah gambar tatanan sosial yang dipegang oleh aktor sosial tertentu. Peneliti mengambil pengertian dari Amitav Acharya tentang konsep *collective identity*.

Menurut Acharya *Collective Identity* sebagai suatu proses dan kerangka kerja di mana negara-negara anggotanya (ASEAN) secara perlahan mulai beradaptasi dengan “keberadaan regional” dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan dalam hubungan antar negara (Acharya 1998, 208).

Menurut Acharya identitas itu penting karena, identitas adalah kunci untuk membangun komunitas ekonomi, sosial budaya dan politik-keamanan. Identitas dikonstruksi secara sosial, menggabungkan logika instrumental dengan sosialisasi bentuk kebiasaan, norma, dan institusi. Lebih dari itu, pembangunan identitas semacam itu tidak sepenuhnya dipisahkan dari ikatan budaya dan sejarah, tetapi diperkuat olehnya. Kedekatan yang sederhana, ikatan sejarah, dan budaya bersama sudah cukup untuk identitas.

Acharya memberikan empat atribut dari konsep *Collective Identity* dalam menyatukan ASEAN, sebagai berikut :

(1) *constitutive norms* atau norma-norma hukum-politik dan sosial-budaya yang telah dikembangkan oleh negara atau suatu kelompok seperti saling menghormati, mengikuti hukum yang telah ditentukan dengan adil, menghormati hak asasi manusia, menghormati hukum moral yaitu saling memahami perbedaan dan menghindari kekerasan.

(2) *social purposes* adalah keinginan bersama untuk mencapai kepada target yang diinginkan bersama seperti kesamaan, kebebasan, perdamaian, sejahtera, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik.

(3) *relational comparisons with other social categories* sebagai komparasi atau perbandingan secara relevan dalam menemukan penyelesaian dari kategori lain yang berupa perbandingan konflik yang dialami oleh suatu kelompok dengan kelompok lainnya untuk menghindari perlawanan secara fisik.

(4) *cognitive models* yaitu suatu kerangka kognitif yang perlu dibangun oleh pemerintah, supaya membangun kesadaran masyarakat atau untuk membentuk kerangka pemikiran agar menghindari kesalahpahaman, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian dimana data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumber atau respondennya. Penelitian ini merujuk kepada masyarakat Melayu berhubungan dengan konflik sosial pada masyarakat melayu Patani di Thailand Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa deskriptif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data yang

bersifat kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan objek latar belakang dan penyelesaian konflik.

c. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

c.1 Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, ensiklopedi, artikel, ataupun media online.

c.2. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, yaitu hasil wawancara dengan responden, sumber data primer penelitian adalah pihak Masyarakat Melayu Patani dan pihak pemerintah yang paham tentang konflik di Thailand Selatan.

1.8.1 Subjek Penelitian

Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. penelitian ini akan menggunakan narasumber yang berupa masyarakat wilayah Thailand Selatan. Level yang akan digunakan adalah level mikro yang merupakan level terkecil dari subjek penelitian, narasumber yang dibutuhkan oleh peneliti tidak kurang lebih dari 10 orang. dari 10 orang tersebut akan berasal dari tiga propinsi Thailand selatan yang berkonflik yaitu propinsi Pattani, Narathiwat, dan Yala.

1.8.2 Alat Pengumpul Data

a. Metode interview

Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi mengenai konflik masyarakat Melayu Patani.

b. Metode observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode ini untuk memperoleh data dan mencatat mengenai konflik Masyarakat Melayu Pattani di Thailand Selatan. Metode ini juga dapat bermanfaat untuk menjelaskan data yang objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.3 Metode analisis data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari

fakta fakta yang khusus, peristiwa peristiwa yang konkrit” kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan konflik masyarakat Melayu Pattani di Thailand Selatan.

